

**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN  
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Perkembangan pembangunan Kabupaten Pacitan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari kondisi perekonomian daerah tahun 2011 yang ditunjukkan dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan meskipun dalam angka sementara sebesar Rp.1.546,16 milyar tahun 2010 meningkat menjadi Rp.1.648,83 milyar pada tahun 2011. Sasaran-sasaran pembangunan tahun 2011 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas yang digariskan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan positif terutama pada tahun 2011 mencapai angka 6,64%, ini menunjukkan bahwa perekonomian semakin baik dan kesejahteraan akan semakin meningkat pula.

Sumber pendapatan daerah yang terbesar masih bertumpu pada dana dari pusat terutama Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya, walaupun dari sisi Pendapatan Asli Daerah terus mengalami kenaikan, dengan cara menggali potensi yang ada. Pada sisi pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan, yaitu digunakan untuk penyertaan modal dan pembiayaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

**3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arahan ekonomi nasional untuk mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan rakyat, terfokus pada:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur: *domestic connectivity*
2. Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi
3. Membaiknya iklim investasi dan usaha (*Ease of doing bussiness*)
4. Penciptaan Kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda (*youth employment*)
5. Percepatan pengurangan kemiskinan mensinergikan klaster 1-4
6. Perbaikan akses pelayanan dasar dan penuntasn rehabilitasi gedung SD/SMP
7. Peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton
8. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi

Adapun isu strategis ekonomi Jawa Timur dalam implementasi RPJMD Jawa Timur yang merupakan tahun terakhir adalah:

1. Target pertumbuhan ekonomi adalah sebagai sebesar 7,5% yang memprioritaskan pertumbuhan pada sektor dominan yaitu Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar, Industri Pengolahan dan Pertanian

2. Inflasi Jawa Timur sebesar 4,09%
3. Sektor Pertanian yang merupakan penyerap tenaga kerja terbesar kontribusinya terus turun selama 5 (lima) tahun terakhir
  - a. Pertanian dengan tenaga kerja mencapai 42% kontribusi turun dari 17,24% di tahun 2005 turun menjadi 15,39% di tahun 2011.
  - b. Industri Pengolahan dengan tenaga kerja mencapai 18%, kontribusi turun dari 29,99% di tahun 2005 turun menjadi 27,13% di tahun 2011
4. Transformasi Ekonomi Jawa Timur masih Perlu mendapatkan Perhatian yaitu Karena ada pergeseran dari sektor Primer ke Tertier ( Perdagangan, dll), sementara lebih dari 38% tenaga kerja masih di Sektor Primer (Pertanian)

Berdasarkan analisis indikator makro ekonomi Kabupaten Pacitan dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional maupun regional, serta berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang pada tahun 2013 merupakan tahun kedua, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan diarahkan pada pemenuhan SPM daerah, peningkatan pelayanan prima, pemberdayaan perilaku hidup sehat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar. Pada sisi perekonomian Kabupaten Pacitan, memprioritaskan pada peningkatan sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebagai penunjang sektor unggulan daerah seperti sektor pertanian, industri kecil, perdagangan, sektor KUKM dan pariwisata.

### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 Dan Perkiraan Tahun 2012**

Evaluasi dan analisa kondisi ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan tahun 2011 yang dapat ditunjukkan dengan indikator makro ekonomi daerah apakah sesuai dengan yang proyeksikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaran PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel T-II.4 pada bab II.

### 3.1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 Dan Tahun 2014

Dengan telah disusunnya Action Plan Percepatan dan perluasan Pembangunan ekonomi Pacitan (AP3EP) 2012-2016 terdapat 18 (delapan belas) isu strategis sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Adapun isu strategis AP3EP adalah:

1. Jalan Lintas Selatan (JLS, Jln Sirip Kabupaten)
2. Peningkatan & pengembangan kapasitas Pelabuhan Perikanan;
3. Peningkatan TPI Tawang menjadi PPI Tawang;
4. Pembangunan Pacitan Sport Center;
5. Pembangunan Waduk, Jaringan Irigasi dan Pengairan;
6. Pengembangan Energi;
7. Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah;
8. Pembangunan Fasilitas Perhubungan Darat, Laut & Udara;
9. Pembangunan Kawasan Industri;
10. Pengembangan Destinasi Pariwisata;
11. Pendirian Pabrik Semen;
12. Pemanfaatan Lahan Strategis;
13. Sentra UKM & Ekonomi Kreatif Produk Unggulan Daerah;
14. Pelayanan Air Bersih;
15. Perumahan Pemukiman
16. Pasar Agropolitan;
17. Peningkatan kapasitas RSU;
18. Pengembangan SDM.

Disamping itu dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan periode tahun 2013-2014. Dengan undang-undang tersebut telah diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, dengan harapan ketergantungan Kabupaten Pacitan dari dana pusat semakin berkurang yang artinya dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan.

Tingkat kemandirian Fiskal Daerah sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.T-III.1  
Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Pacitan  
Tahun 2010-2012

NO	URAIAN	TAHUN		
		2010	2011	2012
1	PAD	29.488.179	44.340.003	44.996.860
2	APBD	682.192.531	892.210.050	901.280.894
3	Prosesntase PAD Terhadap APBD	4,32	4,97	4,99

Sumber : APBD Kab. Pacitan 2009 - 2011 diolah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada tahun 2013 diharapkan Kabupaten Pacitan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kondisi tersebut akan berimplikasi pada menurunnya ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pusat baik berupa DAU, DAK maupun Dana Bagi Hasil dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Kenaikan PAD tidak sebanding dengan laju penambahan dana transfer dari pusat berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk membiayai sisi pengeluaran pada APBD. Pada akhir tahun 2012 diharapkan PAD sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah dalam APBD nilainya semakin besar, sehingga berpengaruh terhadap celah fiskal.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh DPPKA. Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP. Dalam hal pelaporan dan pengawasan, Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK pada tahun 2010 dan 2011 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara target kedepan pada periode tahun 2012-2013, diharapkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah tetap dapat

dipertahankan dengan memperhatikan dan menindaklanjuti temuan BPK dalam bentuk Actionplan.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2009 s/d 2011 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun sumbangan terbesar masih mengandalkan Dana Perimbangan baik DAU, DAK dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sesuai dengan analisis dengan acuan tahun-tahun sebelumnya, dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Pacitan pada tahun 2012-2013. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perkembangan realisasi pendapatan serta proyeksi pendapatan pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.T-III.2  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan  
Tahun 2010 s.d Tahun 2013

(Rp. 000,00)

NO	Uraian	Jumlah			
		2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>29.488.179</b>	<b>44.340.003</b>	<b>44.996.860</b>	<b>53.131.337</b>
1.1.1	Pajak daerah	5.155.151	6.012.320.	6.102.820	6.784.000
1.1.2	Retribusi daerah	17.923.822	10.848.805	11.413.775	16.160.298
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.617.267	2.903.227	3.052.789	3.012.938
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.791.939	24.575.649	24.427.475	27.174.101
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>534.435.121</b>	<b>580.546.898</b>	<b>684.406.828</b>	<b>747.740.464</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	40.760.726	45.894.161.	42.852.184	46.110.302
1.2.2	Dana alokasi umum	435.690.795	480.580537	589.829.914	647.574.262
1.2.3	Dana alokasi khusus	57.983.600	54.072.200	51.724.730	54.055.900
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>131.792.081</b>	<b>217.782.733</b>	<b>138.784.899</b>	<b>186.263.425</b>
1.3.1	Hibah	824.269	1.794.579	833.864	854.711
F11.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	27.845.307	27.465.642	26.770.701	29.581.537
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	67.320.005	175.238.937	111.180.334	132.856.157
1.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya)	35.802.500	13.313.574	22.971.020	22.971.020
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>		<b>695.715.383</b>	<b>842.669.635</b>	<b>891.159.609</b>	<b>987.135.226</b>

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa pendapatan daerah masih menggantungkan pada sumber pendapatan yang berasal dari pusat baik Dana

Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dalam perkembangannya belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintahan di Kabupaten Pacitan.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada:

1. Optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan meminimalkan timbulnya dampak *distortif* atas penggunaan pajak dan retribusi daerah terhadap perekonomian daerah;
4. Menciptakan hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok/individu dan politik serta mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama ditujukan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2013 diarahkan untuk peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada efisiensi dan pengelolaan keuangan serta pendapatan. Selain itu pembangunan daerah yang dilakukan diharapkan mampu dibiayai tidak hanya bersumber dari APBD saja, melainkan dari sumber-sumber yang lain seperti swadaya masyarakat, sektor swasta serta pemerintah, baik propinsi maupun pusat.

Arah kebijakan pembiayaan daerah akan dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2013 meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA). Penerimaan SILPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak

dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan. Penerimaan SILPA tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan dan diprioritaskan. Selain melalui SILPA, kebijakan penerimaan pembiayaan juga ditempuh dengan Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2013 akan ditempuh melalui penggunaan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Perusahaan Daerah yang besarnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil. Bantuan modal kepada masyarakat, disalurkan melalui Belanja Tidak Langsung yang dilakukan oleh DPPKA. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan Daerah tahun 2010 s/d tahun 2013 Kabupaten Pacitan dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel.T-III.3  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan Daerah  
Tahun 2010 s/d Tahun 2013

(dalam ribuan rupiah)

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	35.196.668	49.040.415	32.842.304	54.340.017
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	320.895	500.000	250.000	250.000
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>35.517.563</b>	<b>49.540.415</b>	<b>33.092.304</b>	<b>54.590.017</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	1.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>1.750.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>33.767.563</b>	<b>46.540.415</b>	<b>30.092.304</b>	<b>51.590.017</b>

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

### 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah tahun 2013 disusun dengan memperhatikan, mempertimbangkan potensi peluang dan dinamika permasalahan serta perkembangan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan dan fasilitas umum;
2. Program-program penanganan kemiskinan yang berkelanjutan;
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka memperlancar ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik;
5. Peningkatan efektifitas kebijakan penciptaan kerjasama yang harmonis antara eksekutif, legislatif serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan APBD;
6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Pacitan diproyeksi dengan melihat pada tahun n-3 atau tahun 2010 sampai dengan tahun n-1 atau tahun berjalan 2012. Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2010 s/d tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel.T-III.4  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan  
Tahun 2010 s/d Tahun 2013

(Rp. 000,00)

NO	Uraian	Jumlah			
		2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>520.515.875</b>	<b>583.072.766</b>	<b>640.754.641</b>	<b>694.765.525</b>
2.1.1	Belanja pegawai	450.708.633	506.826.605	563.628.015	625.029.557
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0
2.1.4	Belanja hibah	14.944.599	7.927.956	5.647.842	6.647.842
2.1.5	Belanja bantuan sosial	9.162.940	11.775.430	11.818.604	10.995.883
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	2.862.503	3.006.913	3.031.633	3.531.633
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	42.230.137	48.435.860	54.460.610	45.560.610
2.1.8	Belanja tidak terduga	607.060	5.100.000	2.167.937	3.000.000



NO	Uraian	Jumlah			
		2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>159.926.656</b>	<b>306.137.284</b>	<b>257.526.252</b>	<b>343.959.718</b>
2.2.1	Belanja pegawai	18.481.261	27.271.317	28.514.919	35.210.961
2.2.2	Belanja barang dan jasa	69.350.961	110.618.376	99.374.663	142.059.346
2.2.3	Belanja modal	72.094.433	168.247.589	129.636.669	166.689.411
<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>		<b>680.442.531</b>	<b>889.210.050</b>	<b>898.280.894</b>	<b>1.038.725.243</b>

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan Belanja Tidak Langsung paling besar dipengaruhi oleh belanja Gaji Pegawai. Pada tahun 2010 jumlah anggaran belanja Gaji Pegawai mencapai Rp.450.708.633,00 pada tahun 2011 terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp.506.826.605,00 atau naik 11,07% dibanding tahun 2010, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp.563.628.015 atau meningkat sebesar 10,18% dibanding tahun 2011.

Dari data diatas, juga dapat dilakukan analisis sebagai proyeksi bahwa perkiraan belanja gaji untuk PNS Kabupaten Pacitan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 625.029.557 atau naik 9,82%. Kenaikan belanja Gaji Pegawai diasumsikan dari bertambahnya tunjangan profesi guru dan gaji PNS yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Dari perkiraan belanja gaji tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Pacitan, setelah dikurangi belanja gaji adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel.T-III.5  
Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Pacitan  
Tahun 2012-2013

URAIAN	2011	2012	2013
Total Penerimaan (Dana Tersedia)	892.210.050	901.280.893	1.010.401.297
Jumlah Belanja Gaji PNS	506.826.605	563.628.015	625.029.557
Kapasitas Riil	385.383.445	337.652.878	385.371.740

Sumber : Bappeda Kabupaten Pacitan (diolah)

Dari dana kapasitas riil yang tersedia digunakan untuk membiayai 3 (tiga) kelompok prioritas yaitu:

1. Prioritas I digunakan untuk alokasi pembangunan yang langsung mendukung prioritas RPJMD tahun 2013

2. Prioritas II digunakan untuk alokasi pembangunan daerah yang terkait urusan pelayanan pemerintahan
3. Prioritas III digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan lain sebagainya